



Judul : Di Balik Aksi Andre Rosiade
Tanggal : Rabu, 12 Februari 2020
Surat Kabar : Republika
Halaman : 5

Di Balik Aksi Andre Rosiade

● FEBRIAN FACHRI
RIZKYAN ADIYUDHA

Politikus Gerindra Andre Rosiade menjadi bahan perbincangan setelah aksinya menggelar penggerebekan praktik prostitusi di Kota Padang, Sumatra Barat, beberapa waktu lalu. Ia memang tak sendirian, tetapi bersama jajaran Kepolisian Daerah Sumatra Barat saat menggerebek kamar nomor 606 Hotel Kryriad Bumi Minang, Kota Padang, Ahad (26/1) lalu.

Dari peristiwa itu, politikus muda mengamankan seorang perempuan berinisial NN dan seorang mucikari berinisial AS yang ada di dalam kamar. Keduanya dijerat UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) *juncto* 506 KUHP. Ternyata, aksi penggerebekan ini berbuntut panjang. Pro dan kontra muncul menyikapi aksi 'bik pahlawan' Andre yang membongkar adanya praktik prostitusi di Kota Padang. Sebagian dukungan muncul karena aksi itu menunjukkan adanya praktik prostitusi di Padang.

Namun, hujatan juga muncul karena aksi anggota DPR RI ini dinilai 'kebablasan'. Terlebih, muncul dugaan penggerebekan sengaja dilakukan untuk menjebak mucikari dan pekerja seks komersial (PSK). Sebab, beberapa hari pascapenggerebekan, beredar kuitansi hotel Kryriad Bumi Minang untuk kamar 606 dan 608 saat penggerebekan atas nama Andre Rosiade. Politikus Gerindra itu akhirnya mendapat serangan dari sejumlah pihak. Dia dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas aksinya tersebut.

Pengamat politik Universitas Andalas, Najmuddin M Rasul, menilai, aksi penggerebekan berdasar manuver Andre ini tidak bisa lepas dari sarat kepentingan politik. Pertama, Andre adalah aktor politik yang saat ini duduk sebagai anggota Komisi VI DPR RI. Menurut Najmuddin, setiap gerak-gerik Andre akan berkaitan dengan politik. "Andre itu aktor politik, *news-maker*. Mau tak mau, apa yang ia lakukan akan berbau politik," kata Najmuddin kepada *Republika*, Selasa (11/2).

Najmuddin menyebut ada dua cara pandang dalam melihat keterlibatan Andre. Secara objektif, menurut Najmuddin, apa yang dilakukan Andre merupakan hal biasa. Andre sebagai wakil rakyat merasa harus turun ke daerah pemilihannya (dapil) karena kerap mendengar praktik prostitusi daring di Padang. Tindakan Andre sebagai bentuk upaya mendorong penegak hukum memberantas praktik prostitusi di dapilnya.

Publik melihat Andre mencoba menjegal langkah Wali Kota Padang yang juga politikus PKS Mahyeldi Ansharulah untuk Pemilihan Gubernur Sumbar.

Selanjutnya, yang ramai muncul adalah cara pandang subjektif terhadap Andre. Publik melihat motif politik yang dilakukan Andre. Menurut Najmuddin, penggerebekan bertujuan melemahkan lawan politik untuk kontestasi Pilkada Sumbar 2020. Najmuddin menilai, publik melihat Andre mencoba menjegal langkah Wali Kota Padang yang juga politikus PKS Mahyeldi Ansharulah untuk Pemilihan Gubernur Sumbar. Nama Mahyeldi memang disebut sebagai salah satu calon kuat untuk Pilgub Sumbar 2020.

Andre saat ini juga menjabat sebagai ketua DPD Partai Gerindra Sumbar. Najmuddin mengatakan, sampai saat ini, Gerindra belum selesai dalam membahas, apalagi memutuskan calon yang akan diusung. "Gerindra sampai sekarang kan belum memutuskan calon (cagub) buat pilgub. Dan Andre juga tidak akan mencalon," ujar Najmuddin.

Satu hal yang pasti, menurut dia, aksi Andre sebagai upaya mengangkat nama Gerindra di Ranah Minang demi suara di Pemilu 2024 nanti. "Jadi, ini untuk kepentingan Andre dan Partai Gerindra 2024 nanti. Bukan soal pilgub," kata Najmuddin.

Dilaporkan

Langkah politikus muda Gerindra ini akhirnya mendapat perhatian partainya dan MKD DPR. Kedua lembaga tempat bernaung Andre ini mengagendakan untuk memanggil yang bersangkutan. Sebab, bukan hanya dilaporkan ke MKD, Andre juga dilaporkan ke Bareskrim Polri, Senin (10/2) kemarin. Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengaku partai meminta keterangan kepada Andre karena kasus ini menjadi perhatian publik.

Sejauh ini, partai belum bisa menyimpulkan apakah ada kesalahan dalam tindakan Andre. Dasco ber- asumsi kader Gerindra itu berniat melakukan pengawasan saat masa resesnya. "Jadi, kombinasi dari itu menurut yang bersangkutan memperhatikan dapilnya dan masukan konstituennya serta sebagai daerah tempat dia memimpin daerahnya," ujar Dasco.

Andre sendiri mengaku akan menerima keputusan apa pun yang dijatuhkan mahkamah Partai Gerindra terkait kasusnya. Saat memberi keterangan ke mahkamah partai, Andre membawa 10 rangkap dokumen yang dimasukkan ke dalam map. Dokumen itu diklaim bukti yang siap dibawa ke mahkamah partai dan MKD DPR RI.

Dia mengatakan, dirinya merupakan kader yang patuh dan taat kepada keputusan partai. Dia melanjutkan, hal itu dibuktikan dengan kehadirannya memenuhi panggilan mahkamah. "Ya pokoknya saya kader loyal taat dan patuh apa kata pimpinan," kata Andre.

Ia menegaskan hanya menjalankan tugas sebagai wakil rakyat dalam penggerebekan tersebut. "Sekali lagi, yang melakukan penggerebekan, yang melakukan OTT (operasi tangkap tangan) adalah polisi. Saya sudah jelaskan kronologisnya di mahkamah partai," katanya. ■ **ed: agus raharjo**